BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 *Agency Theory*

Teori keagenan merupakan suatu kondisi terjadi pada suatu perusahaan dimana pihak manajemen sebagai pelaksana yang disebut sebagai agen dan pemilik modal (*owner*) sebagai principal membangun sebuah kontrak kerjasama yang disebut "*nexus of contract*". Kontrak kerjasama ini berisi kesepakatan yang menjelaskan bahwa pihak manajemen perusahaan harus bekerja secara maksimal untuk memberi kepuasan yang maksimal seperti *profit* yang tinggi kepada pemilik modal (*owner*) (Fahmi, 2014).

Menurut Supriyono, R.A. (2018), teori agensi (keagenan) adalah konsep yang mendeskripsikan hubungan antara prinsipal (pemberi kontrak) dan agen (penerima kontrak), prinsipal mengontrak agen untuk bekerja demi kepentingan atau tujuan prinsipal sehingga prinsipal memberikan wewenang pembuatan keputusan kepada agen untuk mencapai tujuan tersebut. Inti dari teori keagenan adalah bahwa manajer seabagai wakil dari pemegang saham dapat mengambil keputusan atau bertindak dengan cara memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Para pemegang saham yang mempunyai kedudukan di manajemen perusahaan disebut sebagai kepemilikan manajerial (*managerial ownership*). Adanya kepemilikan saham oleh pihak manajemen

akan menimbulkan suatu pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh manajemen perusahaan. Kepemilikan manajerial juga dapat diartikan sebagai persentase saham yang dimiliki oleh manajer dan direktur perusahaan pada akhir tahun untuk masing-masing periode pengamatan.

Agency problem bisa dikurangi bila manajer mempunyai kepemilikan saham dalam perusahaan, semakin meningkat proporsi kepemilikan saham manajerial maka akan baik pula kinerja perusahaan. Secara teoritis ketika kepemilikan manajerial rendah, maka insentif terhadap kemungkinan terjadinya peluang manajemen akan meningkat. Kepemilikan manajerial terhadap saham perusahaan dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara pemegang saham luar dengan manajemen. Sehingga permasalahan keagenan diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer adalah juga sekaligus sebagai seorang pemilik. Biasanya, kepemilikan manajerial dihitung dengan besarnya persentase saham yang dimiliki oleh pihak manajemen perusahaan.

2.2 Kinerja Keuangan

Rudianto (2013:189) menjelaskan bahwa Kinerja Keuangan adalah hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan dalam menjalankan fungsinya mengelola aset perusahaan secara efektif selama periode tertentu. Terdapat pula pendapat dari Fahmi (2011:239) yang mengemukakan bahwa Kinerja Keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.

Seperti dengan membuat suatu laporan keuangan yang telah memenuhi standar dan ketentuan dalam SAK (Standar Akuntansi Keuangan) atau GAAP (*General Accepted Accounting Principle*), dan lainnya. Kinerja keuangan merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.

Analisis kinerja digunakan untuk mengukur prestasi yang dimiliki perusahaan. Lima tahap dalam menganalisis kinerja keuangan suatu perusahaan yaitu (Fahmi, 2015):

1. Melakukan review terhadap data laporan keuangan. Tahap pertama yaitu mereview dara laporan keuangan. Review dilakukan dengan tujuan agar laporan keuangan yang sudah dibuat sesuai dengan penerapan kaidah-kaidah yang berlaku umum dalam dunia akuntansi. Tahap ini pada akhirnya akan memberikan hasil laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Melakukan perhitungan. Tahap kedua yaitu melakukan perhitungan terhadap data pada laporan keuangan. Penerapan metode perhitungan disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang sedang dilakukan, sehingga hasil dari perhitungan akan memberikan kesimpulan sesuai dengan analisis yang diinginkan.
3. Melakukan perbandingan terhadap hasi l hitungan yang telah diperoleh. Tahap selanjutnya yaitu melakukan perbandingan pada hasil yang telah diperoleh. Hasil hitungan yang telah diperoleh kemudian dibandingkan

dengan hasil hitungan dari berbagai perusahaan lainnya. Metode yang paling umum dipakai yaitu:

a. *Time series analysis* yaitu membandingkan secara antarwaktu atau antarperiode dengan tujuan akan terlihat secara grafik.
b. *Cross sectional approach* yaitu melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan rasio-rasio yang telah dilakukan antara satu perusahaan dan perusahaan lainnya dalam ruang lingkup yang sejenis yang dilakukan secara bersamaan.
c. Melakukan penafsiran (*interpretation*) terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan.

4. Tahap keempat yaitu menginterpretasikan masalah-masalah yang ada. Melihat kinerja keuangan perusahaan setelah melakukan ketiga tahap, kemudian melakukan penafsiran untuk melihat permasalahan dan kendala-kendala yang dialami perbankan tersebut.
5. Mencari dan memberikan pemecahan masalah (*solution*) terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan. Tahap terakhir setelah menemukan berbagai permasalahan yang ada yaitu mencari solusi. Mencari solusi guna memberikan suatu input atau masukan agar kendala dan hambatan dapat diselesaikan.

Analisis kinerja keuangan perusahaan merupakan suatu proses pengkajian kinerja keuangan perusahaan secara kritis, yang meliputi peninjauan data keuangan, perhitungan, pengukuran, interpretasi, dan pemberian solusi terhadap masalah keuangan perusahaan pada periode tertentu. Berdasarkan

tekniknya, analisis kinerja dapat dibedakan menjadi 9 macam, yaitu (Hery, 2016:26):

1. Analisis perbandingan Laporan Keuangan, merupakan teknik analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan dari dua periode atau lebih untuk menunjukan perubahan dalam jumlah (absolut) maupun persentase (relatif).
2. Analisis Tren, merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui tedensi keadaan keuangan dan kinerja perusahaan, apakah menunjukan kenaikan atau penurunan.
3. Analisis *Common Size*, merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui persentase masing-masing komponen asset tetap terhadap total asset, persentase masing-masing komponen hutang dan modal terhadap total asset, persentase masing-masing komponen laba rugi terhadap penjualan bersih.
4. Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja, merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui besarnya sumber dan pengunaan modal kerja selama dua periode waktu yang dibandingkan.
5. Analisis Sumber dan Penggunaan Kas, merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui kondisi kas dan perubahan kas pada suatu periode waktu tertentu.
6. Analisis Rasio Keuangan, merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan di antara pos tertentu dalam neraca maupun laporan laba rugi.

7. Analisis Perubahan Laba Kotor, merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui posisi laba kotor dari satu periode ke periode berikutnya, serta sebab-sebab terjadinya perubahan laba kotor tersebut.
8. Analisis Titik Impas, merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui tingkat penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian.
9. Analisis Kredit, merupakan teknik analisis yang digunakan untuk menilai layak tidaknya suatu permohonan kredit debitor kepada kreditor, seperti bank.

Kinerja keuangan dapat di ukur dengan rasio profitabilitas. Dimana rasio profitabilitas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimilki perusahaan seperti aktiva, modal atau penjualan perusahaan (Sudana, 2015:25). Semakin besar tingkat keuntungan menunjukkan semakin baik manajemen dalam mengelola perusahaan. Tingkat keuntungan yang diperoleh manajemen dapat mempengaruhi kompensasi yang akan diterima manajemen.

Menurut Kasmir (2014:197), tujuan dan manfaat penggunaan rasio profitabilitas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.

3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu kewaktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri.

Rasio profitabilitas dapat diukur dengan beberapa cara sebagai berikut (Sudana, 2015:25):

1. *Return On Assets* (ROA)

Return On Asstes (ROA) menujukkan kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki oleh perusahaan untuk menghasilkan laba setelah pajak. Rasio ini penting bagi pihak manajemen untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi manajemen perusahaan dalam mengelola seluruh aktiva perusahaan atau dengan kata lain dengan jumlah aktiva yang sama bisa dihasilkan laba yang besar, dan sebaliknya.

Rumus ROA yaitu :

$$\text{ROA} = \frac{\text{EAT (Laba Setelah Pajak)}}{\text{Total Aset}}$$

2. *Return On Equity* (ROE)

Return On Equity (ROE) menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba setelah pajak dengan menggunakan modal sendiri yang dimiliki perusahaan. Rasio ini penting bagi pemegang saham untuk mengetahui

efektivitas dan efisiensi pengolahan modal sendiri yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin efisien penggunaan modal sendiri yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan.

Rumus ROE yaitu :

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Ekuitas Pemegang Sendiri}}$$

3. *Profit Margin Ratio*

Profit Margin Ratio mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan penjualan yang dicapai perusahaan. Semakin tinggi rasio menunjukkan bahwa perusahaan semakin efisien dalam menjalankan operasinya. Profit Margin Ratio dibedakan menjadi.

a. Net Profit Margin

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih dari penjualan yang dilakukan perusahaan. Rasio ini mencerminkan efisiensi seluruh bagian, yaitu produksi, personalia, pemasaran, dan keuangan yang ada dalam perusahaan.

Rumus *Net Profit Margin* yaitu :

$$\text{NPM} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

b. *Operating Profit Margin*

Rasio ini mengukur kemampuan untuk menghasilkan laba sebelum bunga dan pajak dengan penjualan yang dicapai perusahaan. Rasio ini menunjukkan

efisiensi bagian produksi, personalia, serta pemasaran dalam menghasilkan laba.

$$\text{OPM} = \frac{\text{Penjualan Netto} - \text{HPP} - \text{Biaya Adm, Penjualan, Umum}}{\text{Penjualan Netto}}$$

c. *Gross Profit Margin*

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba kotor dengan penjualan yang dilakukan perusahaan. Rasio ini menggambarkan efisiensi yang dicapai bagian produksi.

Rumus *Gross Profit Margin* yaitu :

$$\text{GPM} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Total Aset}}$$

Oleh karena itu kinerja keuangan dapat diukur menggunakan ROA *(Return On Assets)*. ROA merupakan rasio yang menunjukkan hasil atas penggunaan aset perusahaan dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset (Hery, 2015).

2.3 *Good Corporate Governance*

2.3.1 Pengertian *Good Corporate Governance*

Menurut Lestari dan Wirawati (2016), penerapan *good corporate governance* yang lemah dalam sebuah perusahaan dapat memberikan peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk memaksimalkan kepentingan bagi

dirinya sendiri yang pada akhirnya akan merugikan perusahaan. Untuk dapat memperbaiki nilai perusahaan, maka perusahaan-perusahaan di Indonesia harus dapat memperbaiki tata kelola perusahaannya.

Menurut Muh. Arief Effendi (2016) pengertian *good corporate governance* adalah *Good Corporate Governance* merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip transparasi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran dan kesetaraan. Sedangkan menurut Bambang Rianto Rustam (2017:294) pengertian *good corporate governance* adalah C*orporate Governance* merupakan serangkaian keterkaitan antara dewan komisaris, direksi, pihak-pihak yang berkepentingan, serta pemegang saham perusahaan. *Corporate governance* menciptakan sebuah struktur yang membantu perusahaan dalam menetapkan sasaran, menjalankan kegiatan usaha sehari-hari, memerhatikan kebutuhan *stakeholder*, memastikan perusahaan beroperasi secara aman dan sehat, mematuhi hukum dan peraturan lain, serta melindungi kepentingan nasabah.

Menurut Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 definisi Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), adalah Prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Dalam buku *Good Corporate Governance* Tinjauan Etika dalam praktik bisnis Hamdani (2016)

mendefinisikan *corporate governance* sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.

Pengelolaan perusahaan (*corporate governance*) itu sendiri dapat diartikan secara luas pada literatur yang ada dan terbatas. Istilah tersebut berkaitan dengan hubungan antara manajer, direktur, auditor dan pemegang saham, sedangkan secara luas istilah pengelolaan perusahaan dapat meliputi kombinasi hukum, peraturan, aturan pendaftaran dan praktik pribadi yang meningkatkan perusahaan menarik modal masuk, memiliki kinerja yang efesien, menghasilkan keuntungan, serta memenuhi harapan masyarakat secara umum dan sekaligus kewajiban hukum.

Dari definisi GCG yang sudah dipaparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa dengan diterapkannya konsep *good corporate governance* pada perusahaan di Indonesia, diharapkan dapat mencegah adanya kesalahan yang timbul dalam mengambil keputusan dan tindakan-tindakan yang hanya berorientasi pada pihak internal sendiri yang akibatnya hanya bertujuan akan meningkatkan nilai yang nampak pada kinerja perusahaan dan dapat mempengaruhi hubungan dengan peningkatan citra perusahaan yang dapat menjadi pengaruh bagi kepercayaan para investor dalam berinvestasi pada perusahaan tersebut.

Diperlukan manajemen yang baik untuk mencapai hal tersebut dalam mengelola perusahaan sehingga kinerja keuangan perusahaan akan baik pula. *Good Corporate Governance* (GCG) adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengatur, mengelola perusahaan secara profesional

berdasarkan prinsip-prinsip transparasi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran dan kesetaraan, serta mengawasi proses pengendalian usaha, sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada *stakeholders*, karyawan, dan masyarakat. Dewan komisaris, direksi, dan pihak-pihak yang berkepentingan berperan dalam *good corporate governance*.

2.3.2 Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

The indonesian institute for corporation (IICG) dalam Hamdani (2016), mengungkapkan beberapa prinsip pelaksanaan GCG yang berlaku secara internasional sebagai berikut :

1. Hak-hak para pemegang saham, yang harus diberikan informasi dengan benar dan tepat pada waktunya mengenai perusahaan, dapat ikut berperan serta dalam pengambilan keputusan perusahaan, dan turut memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan.
2. Perlakuan sama terhadap pemegang saham, terutama kepada para pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam.
3. Peranan pemegang saham harus diakui sebagaimana diterapkan oleh hukum dan kerja sama yang aktif antara perusahaan serta para pemegang kepentingan dalam menciptakan kesejahteraan, lapangan kerja, dan perusahaan yang sehat dari aspek keuangan.
4. Pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi

menengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta para pemegang kepentingan (*stakeholders).*

5. Tanggung jawab pengurus manajemen, pengawasan manajemen, serta penanggungjawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham.

Prinsip *Good Corporate Governance* menurut *Organization for Economic Co-operation and Development (*OECD) dalam Sedarmayanti (2012) mencakup 5 bidang utama yaitu :

1. Hak pemegang saham dan perlindungan
2. Peran karyawan dan pihak yang berkepentingan lainnya
3. Pengungkapan yang akurat dan tepat waktu serta transfaransi sehubungan dengan struktur dan operasi korporasi
4. Tanggung jaawab dewan (dewan komisaris maupun dewan direksi) terhadap perusahaan
5. Pemegang saham dan pihak berkepentingan lainnya.

Menurut Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* meliputi :

1. Transparansi (*transparency*)

   Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.

2. Akuntabilitas (*accountability*)

   Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

3. Pertanggungjawaban (*responsibility*)

Kesesuaian didalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

4. Kemandirian (*independency*)

Keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

5. Kewajaran (*fairness*).

Keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

2.3.3 Unsur-unsur *Good Corporate Governance*

Menurut Adrian Sutedi (2011 : 41), mengatakan unsur-unsur yang dimiliki *corporate governance*, yaitu, *Corporate governance* memiliki unsur-unsur yang berasal dari dalam perusahaan (dan selalu diperlukan di dalam perusahaan), serta unsur-unsur yang ada di luar perusahaan (dan yang selalu diperlukan di luar perusahaan) yang bisa menjamin berfungsinya *good corporate governance*".

Keberadaan unsur-unsur tambahan tersebut memiliki fungsi dan tanggung jawab yang berkaitan dengan pelaksanaan *good corporate*

governance. Unsur-unsur untuk melengkapi penerapan GCG (Agoes, 2011:109), yaitu :

1. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial (*managerial ownership*) adalah suatu kondisi di mana manajer mengambil bagian dalam struktur modal perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut berperan ganda sebagai manajer sekaligus pemegang saham di perusahaan. Dalam laporan keuangan, keadaan ini dipresentasikan oleh besarnya persentase kepemilikan oleh manajer. Karena cukup tersedianya informasi mengenai hal ini, catatan atas laporan keuangan harus menyertakan informasi ini (Sugiarto, 2011).

Morck *et al.*, (1988) menyatakan bahwa kepemilikan saham yang besar dari segi nilai ekonomisnya memiliki insentif untuk memonitor dan menguji hubungan antara kepemilikan manajerial dan komposisi dewan komisaris terhadap nilai perusahaan. Manajer yang sekaligus pemegang saham akan berusaha bekerja secara optimal dan tidak hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Manajemen selalu berupaya meningkatkan nilai perusahaan karena dengan mengkatkan nilai perusahaan maka kekayaan yang dimiliki sebagai pemegang saham akan meningkat sehingga kesejahteraan pemegang saham akan meningkat pula. Peningkatan kepemilikan manajerial membantu untuk menghubungkan kepentingan internal perusahaan dan pemegang saham

dan mengarahkan ke arah yang lebih baik dalam pengambilan keputusan da nilai perusahaan yang lebih tinggi.

Variabel kepemilikan manajerial diukur dengan menggunakan indikator jumlah presentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajemen dari seluruh jumlah modal saham yang beredar (Sukirni 2012). Pengukuran ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{MNJR} = \frac{\text{Jumlah Saham Komisaris,Direksi dan Manajer}}{\text{Jumlah Saham Beredar}} \text{X } 100$$

2. Kepemilikan Institusional

Menurut Thesarani (2016), kepemilikan insitusional adalah proporsi kepemilikan saham yang dimiliki institusional pada akhir tahun yang diukur dalam presentase saham yang dimiliki investor institusional dalam perusahaan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan *investment banking*.

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba.

Kepemilikan institusional merupakan proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga, seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi atau institusi lainnya. Kepemilikan institusional berperan sebagai *monitoring agent* yang melakukan pengawasan optimal terhadap perilaku manajemen di dalam menjalankan perannya mengelola perusahaan (Sugiarto, 2011).

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain. Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Monitoring tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham, pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal.

Adanya kepemilikan institusional disuatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen. Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional sangat bergantung pada besaranya investasi yang dilakukan.

Kepemilikan institusional diukur dengan menggunakan indikator jumlah presentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak institusi dari seluruh jumlah modal saham yang beredar (Sukirni 2012). Pengukuran ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{INST} = \frac{\text{Jumlah Saham yang dimiliki Institusi}}{\text{Jumlah Saham Beredar}} \text{X } 100$$

3. Ukuran Dewan Komisaris

Dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG (KNKG, 2006). Dewan komisaris merupakan mekanisme pengendalian intern tertinggi yang bertanggung jawab untuk memonitor tindakan manajemen puncak (Fama & Jensen, 1983). Ukuran Dewan Komisaris yang dimaksud disini adalah banyaknya jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan. Menurut Coller dan Gregory (1999) semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, semakin mudah untuk mengendalikan manajer dan semakin efektif dalam memonitor aktivitas manajemen. Fungsi *service* menyatakan bahwa dewan (komisaris) dapat memberikan konsultasi dan nasihat manajemen (dan direksi). Fungsi kontrol yang dilakukan oleh dewan komisaris diambil dari teori agensi. Dari perspektif teori agensi, dewan komisaris mewakili mekanisme internal utama untuk 31 mengontrol perilaku

oportunistik manajemen sehingga dapat membantu menyelaraskan kepentingan pemegang saham dan manajer.

Dewan Komisaris adalah dewan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada dewan direksi. Ukuran Dewan Komisaris dihitung dengan menggunakan total jumlah anggota dewan komisaris di perusahaan. Mekanisme (pengendalian) internal dalam perusahaan antara lain struktur kepemilikan dan pengendalian yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dalam hal ini komposisi dewan. Ukuran Dewan Komisaris adalah jumlah dewan komisaris dalam perusahaan (Sembiring, 2005).

Ukuran Dewan Komisaris dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$UDK = \sum Dewan\ Komisaris$$

4. Komite Audit

Komite Audit adalah auditor internal yang dibentuk dewan komisaris, yang bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan pengendalian intern perusahaan. Indikator yang digunakan untuk mengukur Komite Audit adalah jumlah anggota Komite Audit pada perusahaan sampel. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* jumlah anggota Komite Audit minimal 3 orang. Komite Audit ini merupakan orang yang melakukan pengawasan terhadap perusahaan. Adanya Komite Audit diharapkan mampu mengontrol dan

memonitor keputusan yang dilakukan manajer itu sudah benar yang berarti bahwa keputusan tidak memihak satu pihak, namun mengikat semua pihak yang berkepentingan di dalam perusahaan. Komite Audit dituntut untuk dapat bertindak secara independen, independensi Komite Audit tidak dapat dipisahkan moralitas yang melandasi integeritasnya. Hal ini perlu disadari karena Komite Audit merupakan pihak yang menjembatani antara eksternal auditor dan perusahaan yang juga sekaligus menjembatani antara fungsi pengawasan Dewan Komisaris dengan Internal Auditor.

Ada beberapa peraturan terkait dengan Komite Audit, antara lain:

1. Peraturan Bapepan-LK No. IX.1.5 : Pembentukan dan pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Peraturan ini berisi tentang:
   a) Komite Audit minimal terdiri dari 3 orang, dengan rincian minimal 1 orang komisaris independen yang menempati posisis ketua Komite Audit dan minimal 2 orang pihak independen dari luar emiten.
   b) Salah seorang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan.
2. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-117/M-MBU/2002. Tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang berisi tentang:
   a) Salah seorang anggota Komite Audit adalah anggota Komisaris yang sekaligus berkedudukan dengan Ketua Komite. Tugas dan

tanggung jawabnya adalah membantu Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor.

3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-134/BL/2006 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik. Keputusan ini berisi tentang: 37 Laporan tahunan wajib memuat uraian singkat mengenai penerapan tata kelola perusahaan yang telah dan akan dilaksanakan oleh perusahaan dalam periode laporan keuangan tahunan terakhir.

Komite Audit adalah jumlah komite audit dalam perusahaan (Jeffrio, 2011). Komite Audit dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$KA = \sum Anggota\ Komite\ Audit$$

5. Dewan Komisaris Independen

Komisaris independen menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik dan memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen.

Komisaris Independen pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan

saham, hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris, direksi, pemegang saham pengendali atau hubungan dengan bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara independen. OJK mewajibkan emiten memiliki komisaris independen minimal 30% dari anggota dewan komisaris.

Menurut Lestari (2011) menyatakan bahwa komisaris independen dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara manajer internal. Tindakan lain yang dapat dilakukan oleh komisaris independen adalah mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen. Misi Komisaris Independen adalah mendorong terciptanya iklim yang lebih objektif dan menempatkan kesetaraan *(fairness)* di antara berbagai kepentingan termasuk kepentingan perusahaan dan kepentingan stakeholder sebagai prinsip utama dalam pengambilan keputusan oleh dewan komisaris.

Komisaris Independen dapat diukur dengan rasio atau persentase antara jumlah anggota komisaris independen dibandingkan dengan jumlah total anggota dewan komisaris (Djuitaningsih, 2012).

Dewan Komisaris dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{DKI} = \frac{\Sigma \text{ Anggota Dewan Komisaris Independen}}{\Sigma \text{Anggota Dewan Komisaris}} \text{X } 100\%$$

2.4 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian telah melakukan penelitian tentang pengaruh *good corporate governance* kinerja keuangan. Hasil dari beberapa penelitian akan digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian lain, antara lain adalah sebagai berikut ini :

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Judul, Nama dan Tahun Penelitian	Variabel	Hasil
1.	*The Effect of Good Corporate Governance Mechanism and Corporate Social Responsibility on Financial Performance with Earnings Management as Mediating Variable* Noorlailie Soewarno (2018)	Independen : X1 : *Good Corporate Governance* X2 : *Corporate Social Responsibility* Variabel Mediasi : Manajemen Laba Dependen : Y1 : Kinerja Keuangan Y2 : Manajemen Laba	• Hasil penelitian menunjukkan bahwa GCG berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. • Hasil penelitian menunjukkan bahwa GCG dengan manajemen laba memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan.
2.	*Impact of Corporate Governance Attributes and Financial Reporting Lag on Corporate Financial Performance* *Ben Kwame Agyei-Mensah (2018)*	Independen : X1 : Keterlambatan Pelaporan Keuangan X1 : Corporate Governance Atrributes Dependen : Y1 : Kinerja Keuangan	• Hasil menunjukan bahwa atribut Corporate Governance ada pengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan
3.	*Does Governance Structure Have Any Effect on Firm Performance During The Financial Crisis* *Naveen Kumar Srivastava*	Independen : X1 : Ukuran Perusahaan X2 : Komposisi Perusahaan X3 : Struktur Kepemimpinan	• Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur kepemimpinan mempengaruhi kinerja keuangan

No	Judul, Nama dan Tahun Penelitian	Variabel	Hasil
	(2015)	Dependen : Y1 : Nilai Perusahaan Y2 : Kinerja Keuangan Variabel Kontrol : • Umur Perusahaan • Leverage • Profitabilitas • Konsentrasi kepemilikan • Ukuran perusahaan	
4.	*Does Corporate Governance Affect the Financial Performance? Analysis of Findings from Jordanian Banks* Basman Aldalayeen (2017)	Independen : X1 : Corporate Governance X2 : Ukuran Perusahaan X3 : Pertumbuhan Penjualan X4 : Aset Berwujud Dependen : Kinerja Keuangan	• Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tata kelola perusahaan memiliki dampak positif terhadap kinerja keuangan.
5.	*GCG, Financial Architecture on Stock Return, Financial Performance and Corporate Value* Suhadak, Sri Mangesti Rahayu, and Siti Ragil Handayani (2018)	Independen : X1 : *Good Corporate Governance* X2 : *Financial Architecture* Dependen : Y1 : Pengembalian Saham Y2 : Kinerja Keuangan Y3 : Nilai Perusahaan	• Hasil penelitian ini menunjukan bahwa GCG pengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan
6.	*The Effects of Corporate Governance on Financial Performance and Financial Distres : Evidence from Egypt* Tamer Mohamed Shahwan (2015)	Independen : X1 : *Corporate Governance Index* X2 : Konsentrasi Kepemilikan X3 : Intensitas Modal X4 : Leverage	• Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tidak ada hubungan signifikan CG dengan kinerja keuangan perusahaan. • Hasil ini juga menunjukan bahwa konsentrasi kepemilikan dan kepemilikan

No	Judul, Nama dan Tahun Penelitian	Variabel	Hasil
		Dependen : Y1 : KinerjaKeuangan	institusional tidak ada hubungan dengan kinerja keuangan perusahaan
7.	*Impact of Corporate Governance on Financial Performance of Microfinance Banks in North Central Nigeria* Gadi Dung Paul, Emesuanwu Catherine Ebelechukwu, and Shammah Yakubu (2015)	Independen : X1 : Corporate Governance X2 : Komposisi Dewan X3 : Komposisi Komite Dewan Dependen : Y1 : Kinerja Keuangan	• Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tata kelola perusahaan dengan komposisi dewan dan komposisi komite dewan menunjukan hasil yang negative terhadap kinerja keuangan.
8.	*Global Financial Crisis, Ownership Structure, and Firm Financial Performance An Examination of Listed Firms in Australia* Ali Salman Saleh, Enver Halili, Rami Zeitun, & Ruhul Salim (2017)	Independen : X1 : Struktur Kepemilikan X2 : Ukuran Perusahaan X3 : Umur Perusahaan X4 : Leverage X5 : Resiko X6 : Pertumbuhan Dependen : Y1 : Kinerja Keuangan Y2 : Kinerja Perusahaan	• Hasil penelitian ini menunjukan bahwa struktur kepemilikan memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.
9.	*Corporate Governance Guidelines Compliance and Firm Financial Performance* Erick Rading Outa & Nelson M. Waweru (2018)	Independen : X1 : Corporate Governance X2 : Ukuran Perusahaan X3 : Leverage X4 : Kepatuhan Dewan Dependen : Y1 : Kinerja Keuangan Y2 : Nilai Perusahaan	• Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara Corporate Governance, Kepatuhan Dewan, dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan dan Nilai Perusahaan.

No	Judul, Nama dan Tahun Penelitian	Variabel	Hasil
10.	*Gender Influence, Social Responsibility and Governance in Performance* Andreia Carpes Dani, Jaime Dagostim Picolo, & Roberto Carlos Klann (2019)	Independen : X1 : Corporate Governance X2 : Corporate Social Responsibility Variabel Mediasi : Gender Dependen : Y1 : Kinerja Ekonomi Y2 : Kinerja Keuangan	• Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Corporate Governance memiliki hasil negative dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan • Hasil penelitian ini juga menunjukan bahwa Corporate Governance memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan dengan gender sebagai variabel mediasi

UNIVERSITAS DARMA PERSADA

2.5 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya serta permasalahan yang telah dikemukakan, maka sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis, berikut disajikan kerangka pemikiran teoritis yang dituangkan dalam model penelitian seperti yang ditunjuk pada gambar berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

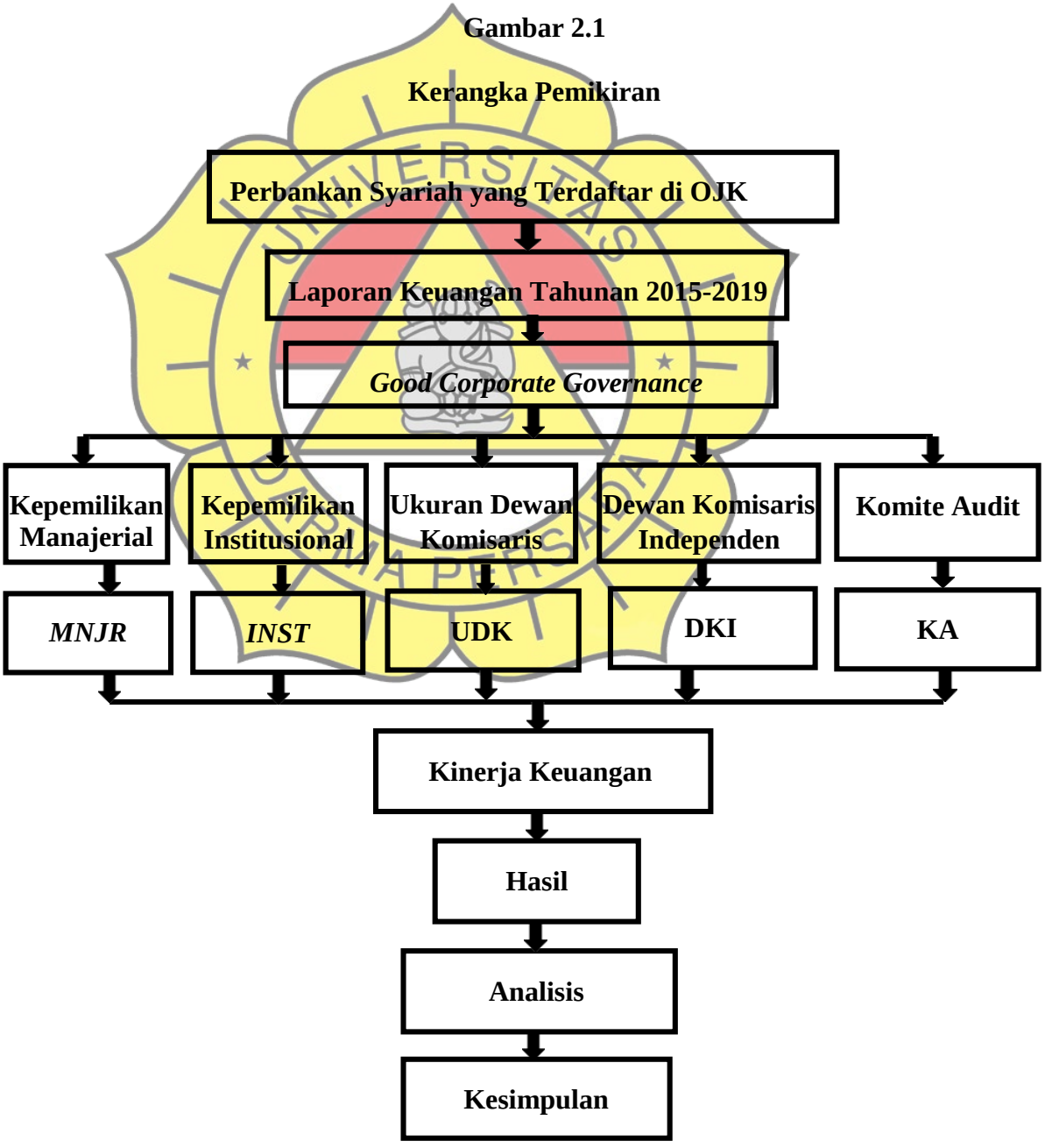

Gambar 2.2

Hubungan Variabel

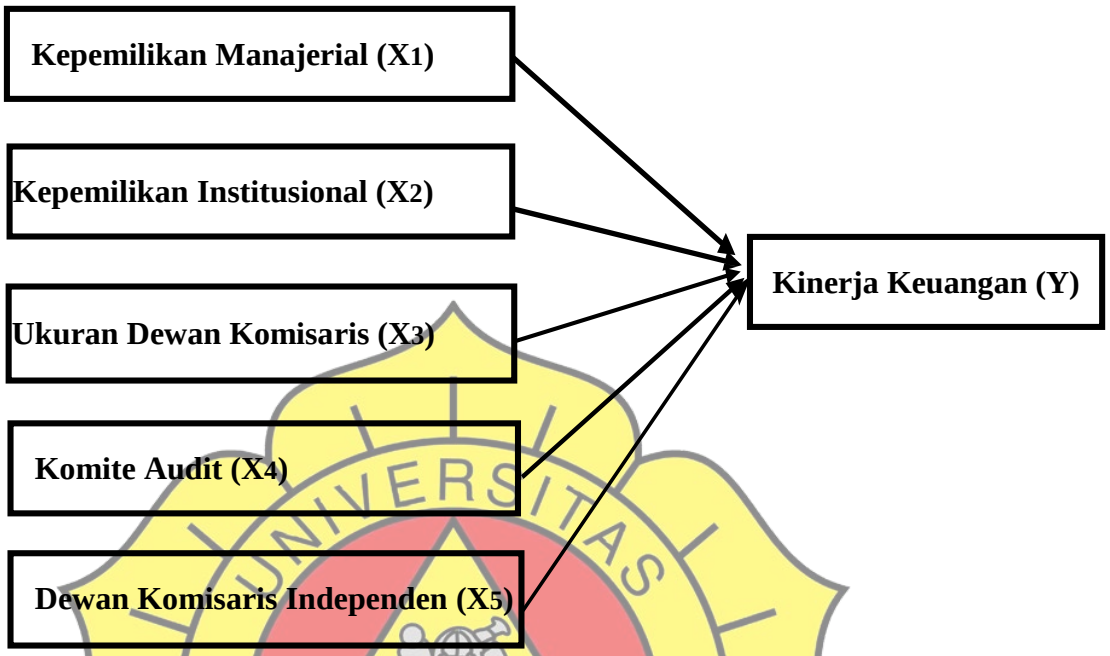

Keterangan :

X1 : Kepemilikan Manajerial (MNJR)

X2 : Kepemilikan Institusional (INST)

X3 : Ukuran Dewan Komisaris (UDK)

X4 : Komite Audit (KA)

X5 : Dewan Komisaris Independen (DKI)

Y : Kinerja Keuangan (KK)

2.6 Hipotesis Penelitian

2.6.1 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Kinerja Keuangan

Biaya agensi yang disebabkan oleh konflik kepentingan antara manajer dan agen dapat dikurangi dengan meningkatkan kepemilikan manajerial di perusahaan. Manajer yang memiliki saham di perusahaan, perusahaan akan makmur, karena secara otomatis kepentingan pribadi juga akan terpenuhi (Purwanto,2011). Oleh karena itu, kepemilikan manajerial dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan dengan meningkat saham yang terdapat diperusahaan. Hasil penelitian Faisal (2004) juga menunjukkan bahwa semakin tinggi kepemilikan manajerial, semakin efisien pemanfaatan aset. Dengan demikian, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H0 : Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

2.6.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Keuangan

Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan keputusan yang strategis dalam perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Adanya kepemilikan saham oleh pihak institusional yang tinggi akan menyebabkan usaha pengawasan yang lebih efektif sehingga hal tersebut akan mampu mencegah perilaku oportunistik manajer (Kusumawati, 2011).

Kepemilikan institusional merupakan saham suatu perusahaaan yang dimiliki oleh investor institusi yaitu perusahaan asuransi, institusi keuangan (bank, perusahaan keuangan, kredit), dana pensiun serta *investment banking* (Yang et al., 2009). Kepemilikan institusional adalah suatu keadaan dimana institusi mempunyai saham dalam suatu perusahaan. Institusi tersebut seperti institusi pemerintah, institusi swasta, domestik maupun asing (Widarjo dan Hartoko, 2010).

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2017) menyatakan bahwa variable kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap variable kinerja keuangan perusahaan. Penelitian serupa oleh Hermiyetti dan Katlanis (2017) diperoleh hasil bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan istitusional memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penelitian oleh Affes (2013) menunjukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Abbasi et al. (2012) bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

Dengan demikian, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H0 : Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

2.6.3 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Kinerja Keuangan

Fungsi utama dari dewan komisaris adalah mengawasi kelengkapan dan kualitas informasi laporan atas kinerja dewan direksi. Dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan. Ukuran dewan komisaris yang besar menyebabkan monitoring manajemen semakin baik. Jika lebih banyak dewan komisaris maka perusahaan akan lebih diawasi dan dapat meminimalisasi kecurangan dalam perusahaan sehingga membuat kinerja keuangan perusahaan semakin meningkat. Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian Dewi dan Widagdo (2012) yang mengatakan bahwa ukuran dewan komisaris mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Dengan demikian, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H0 : Ukuran Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

2.6.4 Pengaruh Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan

Hasil penelitian Arifani (2013) mengatakan bahwa ukuran komite audit mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Komite Audit memiliki tugas terpisah dalam membantu Dewan Komisaris untuk memenuhi tanggungjawabnya dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh. Karena tugas komite audit adalah membantu dewan komisaris maka dengan semakin banyaknya anggota komite audit, maka

pengawasan yang dilakukan semakin baik dan diharapkan dapat memperkecil upaya manajemen untuk memanipulasi masalah data-data yang berkaitan dengan keuangan dan prosedur akuntansi, sehingga kinerja keuangan perusahaan pun akan semakin meningkat.

Dengan demikian, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H0 : Komite Audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

2.6.5 Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Kinerja Keuangan

Penelitian yang dilakukan oleh Sekaredi dan Adiwibowo (2011) menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan studi pada perusahaan yang terdaftar di LQ45. Penelitian ini juga selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Wehdawati (2015) menunjukan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Apabila jumlah komisaris independen semakin besar hal ini dapat memberikan kekuatan kepada dewan komisaris untuk menekan manajemen agar meningkatkan kualitas kinerja keuangan perusahaan. Sehingga jika semakin banyak jumlah komisaris independen terhadap total jumlah dewan komisaris, maka akan tercipta tata kelola perusahaan yang semakin baik. Hal ini disebabkan karena semakin banyaknya jumlah komisaris independen di dalam perusahaan, maka dapat membuat pengawasan terhadap kinerja

manajemen menjadi lebih baik, sehingga akan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan.

Dengan demikian, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H0 : Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.